



Operasional Rumah Sakit Terhambat

RS Jogja Keluhkan Keterlambatan Pembayaran Klaim Rp23 Miliar

BPJS Kesehatan Klaim Telah Membayar Bertahap per 28 Februari

YOGYA, TRIBUN - Keterlambatan pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai sangat menghambat operasional dan pelayanan Rumah Sakit (RS) Jogja. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama RS Jogja, Tutti Setyowati saat rapat bersama yang diselenggarakan di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (28/2).

Kami ngereh-ngereh distributor agar jangan close pasokan ke kita. Ketika uangnya ada, kami pun harus membagi-bagi, yang ini buat obat ini segini, ini untuk obat yang itu, dan seterusnya.

DAMPAK KETERLAMBATAN

- Pasokan obat terganggu
- Operasional rumah sakit terganggu
- Jasa pelayanan dokter terganggu
- Pelayanan pasien juga terganggu

Operasional Rumah Sakit

● Sambungan Hal 13

la menuturkan, total ada sekitar Rp23 miliar klaim yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan. Berdasarkan berita acara yang sudah diajukan ke BPJS Kesehatan pada 25 Januari 2018 yakni sebesar Rp9,7 miliar, 31 Januari 2018 sebesar Rp4,5 miliar, dan 28 Februari 2018 sebesar Rp9 miliar.

"Dulu BPJS (Kesehatan) tidak pernah terlambat membayar klaim. Tapi sejak Oktober sering terlambat," ujarnya kepada wartawan sekuat rapat.

Dampak dari keterlambatan pembayaran tersebut, lanjutnya, sangat serius pada keberlangsungan RS Jogja. Hal itu pengaruh pada pasokan obat, operasional rumah sakit, jasa pelayanan dokter, dan juga pasien.

"Padahal pasien kami 90 persen lebih merupakan pasien BPJS," bebernya.

Pihak RS Jogja pun harus memutar otak agar pasokan obat bagi pasien BPJS tidak terhambat.

"Kami ngereh-reh (meminta) distributor agar jangan close pasokan ke kita. Ketika uangnya ada, kami pun harus membagi-bagi, yang ini buat obat ini segini, ini untuk obat yang itu, dan seterusnya," ungkapnya.

Tuti menuturkan, normalnya RS Jogja membutuhkan biaya sebesar Rp5 miliar per bulan untuk obat, Barang Habis Pakai (BHP), dan Alat Medis Habis Pakai (AMHP).

"Kami sudah ajukan ke APBD, tapi ternyata hanya dianggarkan sekali. Mungkin ada missed persepsi, jadinya dapat Rp5 miliar setahun. Padahal kalau setahun kebutuhannya Rp60 miliar. Nanti kami ajukan lagi di perubahan," tuturnya.

DPRD Kota Yogyakarta berjanji untuk mengajak pihaknya untuk melakukan kunjungan ke BPJS Kesehatan Pusat dan Kementerian Keuangan untuk membi-

arakan persoalan tersebut.

Sementara itu, Tutti menambahkan bahwa pihaknya mendapatkan informasi bahwa pembayaran klaim dari BPJS dilakukan Rabu (28/2).

"Pihak BPJS bilang kalau menunggu transfer dari pusat. Semoga saja sudah cair hari ini (kemarin) tambahnya,"

Pembayaran bertahap

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti membenarkan pembayaran klaim yang dilakukan pihaknya pada Rabu (28/2) kemarin. Namun pembayarannya tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap.

Ia meminta agar pihak terkait untuk bersabar dan menyampaikan secara langsung keluhan yang dialami kepada pihak BPJS.

"Sampai dengan hari ini (kemarin) kami sudah melakukan pembayaran klaim jatuh tempo tanggal 15 Februari," ujarnya singkat. (kur)

- RS Jogja

☑ Netral

☑ Segera

Tindak Lanjut	
<input type="checkbox"/>	Untuk Ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/>	Jumpa Pers

Yogyakarta,
 Pdt. Kepala Sekretaris
 Ttd
 Hastono, S.Sos, MM
 19690723 199603 1 005



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. RSUD (RS Jogja)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005